

Asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah berdasarkan Hukum Pertanahan Indonesia : tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 740K/Pdt/2009, No. 292 PK/PDT/2009, No. 2030K/Pdt/2003 = Horizontal separation principle in space utilization underground Indonesia based on land : Law Judicial Review Decision of The Supreme Court No. 740K/Pdt/2009, 292 PK/PDT/2009, No. 2030K/Pdt/2003

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=20331031&lokasi=lokal>

Abstrak

[Skripsi ini membahas mengenai asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap hak pemilik permukaan tanah yang juga dilihat dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia saat ini belum ada peraturan yang mengatur khusus dan sebagai akibat dari berlakunya asas pemisahan horizontal maka dimungkinkan adanya pembedaan kepemilikan antara permukaan tanah dengan ruang di bawah tanahnya, dengan tidak merugikan hak pemilik permukaan tanah karena apabila hal tersebut dilakukan maka akan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum., This thesis discusses about the horizontal separation principle in the use of the space beneath The Earths Surface in Indonesia and its influence on the owner of the surface rights of the land, which is also seen from the consideration of the Supreme Court Decision relating to this. The method used is juridicial normative. The result of this research is by this time, the use of the beneath The Earths Surface in Indonesia has no specific regulations and as a result of the horizontal separation principle of makes it possible if the ownership between the surface of the land with space under the ground be divided, with no prejudice to the surface of the land owners right as if it made it will be included in the tort.]